

PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN KAP TERHADAP *FEE AUDIT* EKSTERNAL

Putri Puspita Ayu^{*}
Tika Septiani[†]

ABSTRACT

This research aims to know the influence of the Board of Commissioners, the audit committee and the size of KAP partially towards the external audit fee. Data processing analysis is done by testing the effect of the independent variables on the dependent variable. Based on the results of the study, indicate that there is the influence of the size of the board of commissioners, the size of the audit committee and the size of KAP towards the external audit fee on financial sector service companies listed on the Indonesia stock exchange (BEI) in 2014-2016.

Keywords: *Board of commissioners, audit committee, the size of KAP, external audit fee*

1. PENDAHULUAN

Dalam informasi akuntansi, fokus pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor adalah memastikan apakah informasi yang tercatat telah tepat dan mencerminkan setiap peristiwa ekonomi yang telah terjadi selama periode akuntansi (Elder *et al.*, 2008, p.7). Auditor dibutuhkan untuk menguji kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Untuk melakukan proses pengujian kewajaran laporan keuangan tersebut dibutuhkan auditor yang mahir dan mampu melakukan tugasnya sesuai dengan standar serta mempunyai pengetahuan di bidang kajian yang dijadikan ruang lingkup pemeriksaan akuntansi. Dalam proses pemeriksaan

^{*} Universitas Swadaya Gunung Jati

[†] Universitas Swadaya Gunung Jati

tersebut, perusahaan perlu mengeluarkan biaya-biaya atas pemeriksaan akuntansi yang dinamakan *fee audit*.

Pada 2 Juli 2008 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengeluarkan Surat Putusan Ketua Umum IAPI Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008. Dalam surat putusan tersebut dijelaskan panduan penentuan *fee audit* yang sampai sekarang masih berlaku dan masih dijadikan landasan dalam menetapkan besaran *fee audit*. Surat ini sebenarnya sudah cukup memadai sebagai landasan dalam penetapan *fee audit*, tetapi dalam surat tersebut masih belum ada peraturan tentang bagaimana mekanisme untuk mendorong penerapan ketentuan *fee audit* yang terstandardisasi. Selain itu, masih belum terdapat peraturan tentang sanksi atas pekerjaan anggota yang tidak sesuai dengan standar.

Dalam penetapan *fee audit*, sering terjadi *fee* tidak sesuai dengan keinginan auditor, malahan dikatakan rendah. Dengan rendahnya *fee* yang diberikan akan sangat memungkinkan auditor menerapkan prosedur di bawah standar, sehingga dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas jasa audit yang diberikan dan pada akhirnya dapat merusak citra profesi akuntan publik itu sendiri. Dengan adanya adopsi Standar Audit Internasional (SAI), kenaikan harga-harga primer serta perubahan besaran *fee* di setiap level profesional, pengurus IAPI melalui surat putusan tanggal 27 April 2015 membentuk tim *ad hoc*. Tugas yang dilakukan oleh tim ini antara lain adalah menyusun dan merumuskan kembali rancangan panduan penetapan *fee audit* beserta ilustrasi perhitungan penetapan *fee audit* untuk diterapkan pada seluruh kantor akuntan publik serta melakukan diskusi dengan berbagai pihak dalam rangka melaksanakan tugas.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penetapan besaran *fee audit*, yaitu ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan ukuran KAP. Variabel independen pertama yang diteliti dalam penelitian ini adalah ukuran Dewan Komisaris. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh pada *fee audit* karena Dewan Komisaris mempunyai fungsi mengawasi proses pelaporan keuangan, dan dapat memengaruhi laporan keuangan yang dibuat bagian internal. Dengan baiknya laporan keuangan tentu tugas auditor independen pun akan semakin ringan.

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah ukuran Komite Audit. Menurut Aldridge (2005) dalam Ardianingsih (2013), Komite Audit memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, kebijaksanaan akunting, kepatuhan terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pengungkapan laporan keuangan yang transparan dan kepatuhan pada mekanisme *good corporate governance*. Agar Komite Audit memiliki kinerja yang baik, BAPEPAM mengeluarkan peraturan bahwa setiap perusahaan yang telah *go public* wajib memiliki Komite Audit.

Variabel independen adalah ukuran KAP. Ukuran KAP dibagi dua, yaitu, KAP *Big Four* dan KAP *Non-Big Four*.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Ukuran Kap terhadap *fee audit* Eksternal pada Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dewan

komisaris, komite audit, dan ukuran kap secara parsial terhadap *fee audit* eksternal.

2. TINJAUAN LITERATUR

Fee Audit

Fee audit diatur dalam Surat Keputusan Ketua Umum IAPI Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008. Dalam surat tersebut dikemukakan, “Tarif imbal jasa (*charge-out rate*) harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing”. Maka dapat disimpulkan bahwa *fee audit* adalah sejumlah biaya yang besarnya berbeda-beda, yang diterima oleh akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan auditnya dan dilakukan dengan cara negosiasi antara pihak *stakeholders* dan akuntan publik.

Pengukuran *Fee Audit*

Fee audit dihitung dari logaritma natural *fee audit* umum yang terdapat dalam laporan tahunan.

$$Fee\ Audit = \text{Logaritma natural } Fee\ Audit$$

Sumber: Chandra (2015)

Dewan Komisaris

Mulyadi (2014, p.185) mengemukakan bahwa Dewan Komisaris adalah “wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi)”. Dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris adalah wakil

pemegang saham dalam suatu perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen serta memberikan masukan kepada dewan direksi dan memastikan GCG tercipta dengan baik dalam perusahaan tersebut.

Anggota Dewan Komisaris haruslah mempunyai dan memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga dalam melakukan tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadinya atau pihak lain yang terkait dengan independensi. Kemudian diharuskan mematuhi anggaran dasar dan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas yang dilakukannya, dan melaksanakan pedoman GCG-nya (Zarkasyi, 2008, p. 97).

Pengukuran Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris diukur dari jumlah total dewan komisaris yang ada dalam perusahaan yang dicantumkan dalam laporan tahunan.

Ukuran Dewan Komisaris = Σ Dewan Komisaris dalam perusahaan

Sumber: Chandra (2015)

Komite Audit

Menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-643/BL/2012, “Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris”. Disimpulkan bahwa Komite Audit adalah

suatu komite yang dibentuk Dewan Komisaris yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan internal, memastikan keefektifitasan auditor internal dan auditor eksternal, serta memperkuat independensi auditor.

Pengukuran Ukuran Komite Audit

Komite Audit diukur dari jumlah total Komite Audit yang ada dalam perusahaan yang dicantumkan dalam laporan tahunan.

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \Sigma \text{Komite Audit dalam perusahaan}$$

Sumber: Ardianingsih (2013)

Ukuran KAP

Sesuai dengan PMK 17/2008 dalam Elder *at al.* (2008, p. 37), terdapat dua struktur organisasi bagi Kantor Akuntan Publik, yaitu

1. Perusahaan perseorangan (*proprietorship*)

Kantor akuntan publik perseorangan adalah kantor akuntan dengan pemilik tunggal.

2. Persekutuan (*partnership*)

Kantor akuntan publik persekutuan sama seperti perusahaan perseorangan, tetapi dalam persekutuan memiliki banyak pemilik.

Adapun KAP yang tergolong dalam *The Big Four* adalah sebagai berikut:

Tabel 1
KAP BIG-FOUR

Firma	Kantor pusat
Deloitte Touche Tohmatsu	Amerika Serikat
PricewaterhouseCoopers	Britania Raya
Ernst & Young	Britania Raya
KPMG	Belanda

Sumber: Elder (2008)

Pengukuran Ukuran KAP

Ukuran KAP diukur dari KAP yang digunakan dalam mengaudit laporannya, yang diklasifikasikan dalam *Big Four* dan *Non-Big Four*.

$$Big\ Four = 1$$

$$Non-Big\ Four = 0$$

Sumber: Chandra (2015)

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Dewan Komisaris mempunyai tugas penting, yaitu melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan *corporate governance* tercipta dalam perusahaan tersebut (KNKG, 2006). Penetapan jumlah Dewan Komisaris disesuaikan dengan anggaran dasar, dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris yang melakukan tugasnya dengan efektif tentu dapat menyebabkan laporan keuangan yang dibuat menjadi berkualitas. Dengan kualitas tersebut fungsi auditor independen menjadi lebih sedikit sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih sedikit dalam melakukan pengauditan, yang akhirnya memengaruhi *fee audit*.

H_1 = Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *fee audit*.

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Fee Audit*

Banyaknya anggota Komite Audit akan membuat kinerja Komite Audit tersebut sangat efektif. Dalam tugas utamanya, yaitu menentukan akuntan publik yang akan digunakan sebagai pemeriksa laporan keuangannya, Komite Audit akan menentukan Akuntan Publik yang memiliki tingkat independensi yang tinggi. Dengan tuntutan tersebut, tentu Komite Audit akan memilih KAP yang lebih profesional. Di sini KAP yang lebih profesional tentu mempunyai reputasi yang baik sehingga KAP akan melakukan tugasnya dengan bersungguh-sungguh guna menjaga nama baik KAP tersebut dan guna memenuhi tuntutan dari Komite Audit. Hasil yang berkualitas akan memengaruhi *fee audit*.

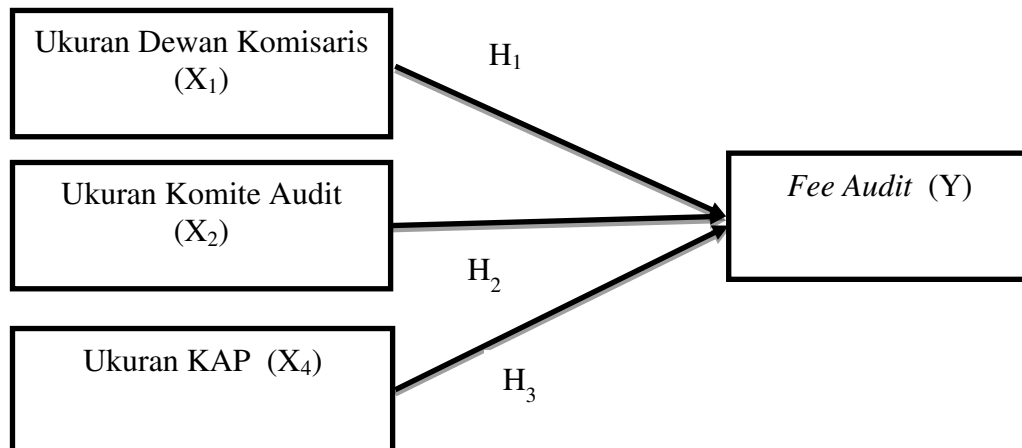
H_2 : Ukuran Komite Audit berpengaruh pada *fee audit*

Pengaruh Ukuran KAP terhadap *Fee Audit*

Kantor KAP *Big Four* tentu memiliki jam terbang yang banyak dan reputasi yang baik. Mereka dalam melakukan tugasnya akan berusaha dengan keras menjaga nama baik KAP-nya serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan KAP-nya. KAP *Big Four* akan lebih teliti dan bersungguh-sungguh dalam melakukan tugasnya. Dengan kesungguhan tersebut, pasti akan didapatkan hasil yang baik dan dihasilkan pelaporan yang berintegritas tinggi dan dapat dipercaya. Jadi, KAP *Big Four* oleh masyarakat dipandang lebih baik dalam memberikan jasa audit dibandingkan KAP *non-Big Four*.

H_3 : Ukuran KAP berpengaruh pada *fee audit*.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka pemikiran

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian verifikatif, yaitu menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Operasionalisasi Variabel

Berikut ini tabel operasional variabel dalam penelitian ini:

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Sub Variabel	Pengukuran	Skala
1	<i>Fee Audit</i>	Profesional <i>Fee Audit</i>	Logaritma natural dari <i>Fee Audit</i>	Rasio
2	Ukuran	Ukuran	Jumlah Dewan Komisaris yang	Rasio

	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris	ada dalam perusahaan	
3	Ukuran Komite Audit	Ukuran Komite Audit	Jumlah Komite Audit yang ada dalam perusahaan	Rasio
4	Ukuran KAP	1. KAP <i>Big Four</i> 2. KAP non- <i>Big Four</i>	1. Apabila menggunakan KAP <i>Big Four</i> maka diberikan nilai 1 2. Apabila bukan KAP <i>Big Four</i> maka diberikan nilai 0.	Nominal

Sumber: Chandra (2015); Ardianingsih (2013)

Analisis Regresi Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda, yaitu menghubungkan satu variabel dependen dengan variabel independen. Berikut persamaan regresi dalam penelitian ini:

$$\text{AuFee} = a + b_1 \text{BoardSize} + b_2 \text{ACSize} + b_3 \text{Big4} + e$$

Keterangan:

AuFee	=	<i>Fee Audit</i>
a	=	Konstanta
b ₁ b ₂ b ₃	=	Koefisien Regresi
BoardSize	=	Jumlah Dewan Komisaris
ACSize	=	Jumlah Komite Audit
Big4	=	Ukuran KAP
E	=	<i>Error</i>

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda

Berikut ini data hasil analisis regresi berganda variabel ukuran Dewan Komisaris (BoardSize), ukuran Komite Audit (ACSize), dan ukuran KAP (Big4), dengan variabel dependen *fee audit* (AuFee):

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	
	B	Std. Error	Coefficients Beta			
1	(Constant)	,119	,469		,254	,000
	BoardSize	,001	,017	,006	,040	,030
	ACSize	,005	,006	,119	,785	,000
	Big4	1,108	0,189	0,477	5,873	,000

a. Dependent Variable: AuFee

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2017

Dari Tabel 3, diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$\text{AuFee} = 0,119 + 0,001 \text{ BoardSize} + 0,05 \text{ ACSize} + 1,108 \text{ Big4} + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,119 menunjukkan bahwa jika ukuran Dewan Komisaris (BoardSize), ukuran Komite Audit (ACSize), dan ukuran KAP (Big4) dianggap konstan, nilai *fee audit* (AuFee) adalah 0,119.
2. Nilai koefisien regresi variabel ukuran Dewan Komisaris (BoardSize) sebesar 0,001 menunjukkan bahwa jika variabel lainnya tetap dan Jumlah

Dewan Komisaris mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, *fee audit* (AuFee) akan mengalami kenaikan sebesar 0,001.

3. Nilai koefisien regresi variabel ukuran Komite Audit (ACSize) sebesar 0,05 menunjukkan bahwa jika variabel lainnya tetap dan Jumlah Komite Audit mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, *fee audit* (AuFee) akan mengalami kenaikan sebesar 0,05.
4. Nilai koefisien regresi variabel ukuran KAP (Big4) sebesar 1,108 menunjukkan bahwa jika variabel lainnya tetap dan ukuran KAP mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, *fee audit* (AuFee) akan mengalami kenaikan sebesar 1,108.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,613 ^a	0,376	0,331	0,60289

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* yang dihasilkan dari model regresi adalah 0,331. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan ukuran KAP terhadap *fee audit* adalah 33,1% sedangkan sisanya 66,9% dipengaruhi variabel lain. Contohnya internal audit, struktur *good corporate governance* lainnya, serta rasio-rasio keuangan.

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang banyak tentu akan mudah menemukan masalah-masalah yang akan berakibat pada proses pelaporan

keuangan; dengan demikian, hal ini memungkinkan pengambilan putusan dengan efektif, tepat, dan cepat. Dewan Komisaris yang melakukan tugasnya dengan efektif tentu dapat menyebabkan laporan keuangan yang dibuat menjadi berkualitas. Dengan kualitas tersebut fungsi auditor independen menjadi lebih sedikit sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih sedikit dalam melakukan pengauditan, dan akhirnya akan memengaruhi *fee audit*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan pada *fee audit*, maka hipotesis pada variabel ukuran Dewan Komisaris diterima. **Pengaruh ukuran Komite Audit terhadap *Fee Audit***

Tugas utama komite audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik. Komite Audit yang bekerja dengan baik dan menginginkan peningkatan status organisasi tentu akan menentukan Akuntan Publik yang memiliki tingkat independensi yang tinggi. Dengan tuntutan tersebut, Komite Audit akan memilih KAP yang lebih profesional dan akan berpengaruh pada *fee audit* yang diberikan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ukuran Komite Audit berpengaruh pada *fee audit*.

Kantor KAP *Big Four* tentu memiliki jam terbang yang banyak, reputasi yang baik. Mereka dalam melakukan tugasnya akan berusaha dengan keras dalam menjaga nama baik KAP-nya serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan KAP-nya. KAP *Big Four* akan lebih teliti dan bersungguh-sungguh dalam melakukan tugasnya. Dalam kesungguhan tersebut tentu pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Maka dihasilkanlah pelaporan yang berintegritas

tinggi dan dapat dipercaya sehingga akan berpengaruh pada *fee audit* yang diberikan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ukuran KAP berpengaruh pada *fee audit*, maka hipotesis untuk variabel ukuran Komite Audit diterima.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh ukuran Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, dan ukuran KAP terhadap *fee audit* eksternal pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014—2016. Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan data *fee audit* yang sebenarnya dibanding *profesional fees*, menambah sampel penelitian yang tidak hanya perusahaan jasa sektor keuangan, dan menambah periode penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardianingsih, A. (2013). Hubungan Komite Audit Dan Kompleksitas Usaha Dengan *Audit Fee*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 13(02): 20–28.
- Chandra, M. O. (2015). Pengaruh *good corporate governance*, karakteristik perusahaan dan ukuran Kap terhadap *fee audit* eksternal. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 13,26, 174–194.
- Elder, R. J. *et al.* (2008). *Jasa audit dan assurance*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jemada, M. V, dan Yaniartha S, P. D. (2013). Pengaruh tekanan anggaran waktu, kompleksitas tugas dan reputasi auditor terhadap *fee audit*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3,3, 132–146.
- Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKG).2006.
- Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK NOMOR: KEP-643/BL/2012.
- Lampiran Keputusan Ketua Bapepam NOMOR: KEP-431/BL/2012.
- Mulyadi. (2014). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

Surat Keputusan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2008). No. KEP.024/IAPI/VII/2008.

Wibowo, R. H. (2012). Pengaruh struktur governance dan etnisitas terhadap *fee audit*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53,9, 1689–1699.

Wibowo, R., & Rohman, A. (2013). Pengaruh *governance structure* dan fungsi *internal control* terhadap *fee audit* eksternal pada perusahaan publik di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2,1,1–13.

Zarkasyi, D. H. (2008). *Good corporate governance*. Alvabeta.